

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya pertumbuhan teknologi dan perekonomian di setiap negara yang semakin dituntut untuk menjadikan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat maupun daerah wajib menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan seperti transparansi dan akuntabilitas. Menurut Suhaeti et al (2015), akuntabilitas merupakan suatu tugas pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab dalam penyajian dan pelaporan serta pengungkapan seluruh kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 terkait Pemerintahan Daerah yang menetapkan gambaran pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pertanggungjawaban tersebut dapat melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan akan digunakan sebagai bukti apakah pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan baik dan layak untuk pengambilan keputusan. Bukti nyata untuk benar-benar melaksanakan akuntabilitas dan transparansi pada tata kelola keuangan pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan informasi yang tidak menyesatkan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas.

Tanggung jawab atas tata kelola keuangan daerah yang disajikan dalam pelaporan finansial pemerintah daerah yaitu terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi yang terdapat didalamnya akan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat ketetapan yang nantinya dapat mendukung pemerintahan ke arah yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Maka untuk memenuhi karakteristik tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu adalah peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 bertujuan untuk acuan bagi penyusunan laporan keuangan. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan yaitu rakyat, anggota dewan, pengawas, dan pemeriksa. Pemerintah daerah dapat melaksanakan transparansi dan akuntabilitas jika informasi yang tercantum di laporan keuangan telah sama dengan karakteristik kualitatif, sehingga informasi itu bisa membantu dalam membuat keputusan serta bisa dimengerti oleh pengguna. Pemerintah daerah perlu mengamati data yang terdapat di pelaporan keuangan untuk perancangan, pengawasan dan menentukan keputusan.

Pelaporan keuangan wajib mencakup karakter tertentu yang dipersyaratkan dalam PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Karakteristik pelaporan keuangan pemerintah merupakan kondisi yang diharuskan untuk penyusunan pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami. Pelaporan keuangan yang berkualitas tinggi harus tersusun sama dengan dasar dan kaidah yang berlaku, sehingga LKPD perlu merujuk pada SAP. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa SAP yaitu aturan akuntansi yang digunakan untuk menyusun serta menyajikan pelaporan, dengan demikian SAP merupakan syarat yang mengikat secara peraturan untuk mengembangkan mutu pelaporan keuangan pemerintah Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah selesai disusun oleh Komite Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada tahun 2010 dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, akurat, relevan untuk mengambil keputusan. Selain itu, keefektifan dalam penerapan SAP berbasis akrual sangat diperlukan pemerintah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang jelas dapat dipertanggungjawabkan dan lengkap sesuai SAP.

Laporan keuangan dengan kualitas tidak lepas dari implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP. SPIP adalah metode lengkap dimana pimpinan serta seluruh pegawai melakukan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan untuk memberikan keyakinan yang cukup untuk mencapai harapan instansi melewati aktivitas yang efisien dan efektif, kecakapan pelaporan, perlindungan kekayaan negara, dan kepatuhan pada peraturan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 SPIP terdiri atas beberapa komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal. Adanya SPIP diharapkan mampu membantu mengembangkan mutu informasi dalam laporan keuangan. SPIP juga dapat diartikan sebagai sistem pengendalian internal yang dilakukan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara menyeluruh, yaitu dengan melakukan pengawasan yang bertujuan untuk memenuhi efektivitas, efisiensi, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Pengendalian internal juga akan mewujudkan pelaporan yang andal, perlindungan kekayaan negara dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Apabila suatu organisasi atau entitas terdapat kelemahan pada pengawasan internal maka akan menyebabkan kualitas laporan keuangan menjadi buruk, sehingga dengan menerapkan SPIP diharapkan dapat mewujudkan pengamatan yang ketat pada seluruh organisasi dan laporan keuangan ditampilkan dengan cara wajar terhindar dari salah saji.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan cara mengaudit secara berkala. Evaluasi BPK dituangkan kedalam opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Jika suatu pembukuan memperoleh opini WTP, maka laporan bisa dipercaya untuk media pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Pemerintah daerah harus menyajikan laporan data terkini agar tercipta laporan yang relevan. Salah satu hal yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Alfian (2015), sistem informasi akuntansi merupakan suatu alat yang digunakan manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif dan dapat menjadi alat kontrol. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat dan membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif di dalam organisasi tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan respon positif terhadap SIMDA guna membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara relevan. Tersedianya teknologi informasi seperti SIMDA diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Namun menurut Alfian (2015) berdasarkan hasil penelitiannya terkait penggunaan SIMDA masih dikatakan lemah atau belum optimal yang menyebabkan penerapan SIMDA oleh SKPD belum dapat membantu mencapai tujuan organisasi Pemda secara maksimal. Pada BKAD Kabupaten

Kulon Progo belum ada kepastian tentang *software* yang dijadikan standar dalam prosedur akuntansi, seringkali BKAD Kulon Progo berganti sistem informasi akuntansi. Seringnya pergantian *software* akuntansi membuat para pegawai harus memahami *software* baru. Aplikasi SIMDA menuntut penggunanya tidak hanya ahli dalam akuntansi tetapi juga dalam penggunaan teknologi informasi.

Penelitian sebelumnya yang mendukung kualitas laporan keuangan SKPD di pengaruhi oleh penerapan SAP adalah penelitian Sinaga, R. (2019) mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Samosir serta penelitian Ratnamas, R. (2018) juga mengatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Baharsyah, R. (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Firmansyah, I. (2020) mengatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Philadelphia (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan serta penelitian Purba, N. (2018) juga mengatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara signifikan sistem pengendalian internal pemerintah

terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa Kecamatan Sei Suka. Menurut Sulistiyantoro (2021) mengungkapkan bahwa SPI menjadi kontrol dalam mengawal penggunaan aplikasi akuntansi dengan memperhatikan unsur SPI. Penggunaan SPI pada laporan keuangan berbasis aplikasi juga dapat digunakan untuk mengawal proses agar berjalan dengan semestinya.

Penelitian Gunadi, E. (2017) mengatakan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fahrurrozi (2019) penggunaan SIMDA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan dan pencegahan *fraud* pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti hendak menguji kembali apakah penerapan SAP, SPIP dan Penggunaan SIMDA dapat memberikan dampak yang sama pada kualitas laporan keuangan dengan objek penelitian berbeda yaitu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo dengan rentang waktu 2018-2020. BKAD adalah entitas akuntansi yang berkewajiban mencatat pendapatan, belanja atau pengeluaran, dan aset yang terjadi di lingkungan SKPD. Menurut pengamatan sebelumnya, BKAD Kulon Progo dalam memperoleh WTP, terdapat catatan penjelas mengenai pencatatan administrasi aset tetap. Catatan ini adalah seperti ada pengurus barang di SKPD yang belum menambahkan jumlah asset saat ada pemeliharaan gedung yang nilainya diatas Rp 10 juta. Maka perlu melakukan pengawasan yang ketat dan

memastikan bahwa SPIP berjalan sesuai peraturan. (<https://bkad.kulonprogo.go.id/detil/1097/raih-opini-wtp>).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus mengoptimalkan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, perlu adanya penguatan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah karena kelemahan yang mungkin terjadi adalah pada pendokumentasian proses pengendalian, mulai dari sosialisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai evaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Peningkatan kualitas SPIP dengan menggunakan lima komponen SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal, serta meningkatkan pemahaman penggunaan SIMDA. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk memilih BKAD Kabupaten Kulon Progo sebagai objek penelitian. Penulis ingin meneliti standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah dan penggunaan SIMDA dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan BKAD Kabupaten Kulon Progo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo?

3. Apakah penerapan SIMDA memiliki pengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo?
4. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penggunaan SIMDA memiliki pengaruh secara simultan pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penggunaan SIMDA pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan penggunaan SIMDA pada kualitas laporan keuangan BKAD Kulon Progo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasar tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Teoritis

- a. Untuk meningkatkan serta memperbanyak pengetahuan akademis terkait pengaruh SAP, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi bagi seluruh mahasiswa.
- b. Memberikan bukti tentang pengaruh penerapan SAP, SPIP dan penggunaan SIMDA pada kualitas pelaporan keuangan BKAD Kulon Progo.

1.4.2 Praktis

- a. Bagi SKPD

Dapat memberikan masukan dalam penerapan SAP, SPIP serta penggunaan SIMDA agar dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk mempraktikkan teori yang sudah didapatkan dengan permasalahan yang benar-benar terjadi, selain itu sebagai syarat untuk memperoleh gelar S-1 Jurusan Akuntansi di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

1.5 Kontribusi Penelitian

Terdapat tiga kontribusi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Kontribusi praktis

Sebagai pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan SAP, SPIP dan penggunaan SIMDA, sehingga dapat menghasilkan pelaporan

keuangan yang berkualitas tinggi agar bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan.

1.5.2 Kontribusi teoretis

Sebagai bahan pustaka dalam mengembangkan ilmu akuntansi yang terkait dengan pengaruh penerapan SAP, SPIP serta penggunaan SIMDA pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

1.5.3 Kontribusi kebijakan

Masyarakat yang sebagai pemangku kepentingan, dengan adanya penelitian ini mampu membantu dalam mengetahui tingkat kualitas tata kelola keuangan daerah dan mendukung untuk memberikan partisipasinya dalam memantau dan mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu terkait dengan kualitas pelaporan keuangan yang terdapat di SKPD Kabupaten Kulon Progo. SKPD di penelitian ini merupakan BKAD. Kualitas pelaporan keuangan dapat dipengaruhi oleh penerapan SAP, SPIP dan penggunaan SIMDA. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel yang dipilih, peneliti memilih menambah variabel independen yaitu SAP, SPIP dan penggunaan SIMDA, pada objek dan waktu melakukan penelitian juga berbeda yaitu di BKAD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018-2020, selain itu perolehan datanya menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner kepada responden sesuai yang diteliti.